

Dinsos Kabupaten Balangan Salurkan 109 Ton Beras Untuk Peserta PKH



banjarmasinpost.co.id/isti-rohayanti

109 ton beras dibagikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Sasarannya yakni peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebar pada delapan kecamatan di Balangan.

Pendistribusian beras ini dimulai dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Plh Sekda Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif secara simbolis melepas keberangkatan penyalur beras kepada peserta PKH, penyaluran beras rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Ucapan terimakasih disampaikan oleh penerima bantuan, Norfah. Warga dari Kecamatan Paringin Selatan ini mewakili KPM lainnya untuk menerima beras secara simbolis.

Ungkapnya, beras bulog yang dibagikan untuk masyarakat memiliki rasa yang enak, terpenting beras tersebut layak untuk dikonsumsi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Ribowo menerangkan, ada beberapa lokasi untuk pendistribusian. Rencananya pada wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan akan dijadwalkan pada Sabtu (29/9/2020). Kemudian berlanjut pada Kecamatan Lampihong dan Batumandi.

Pada Senin berikutnya penyaluran ditujukan ke wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi. Terakhir dijadwalkan Selasa (30/9) pada Kecamatan Juai dan Halong.

Penyaluran beras yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ucap Ribowo dilakukan dua tahap sekaligus. Yakni Agustus dan September. Sehingga KPM menerima dua karung beras atau 30 kg.

Perihal penyaluran beras yang dikirimkan kepada masyarakat, Plh Sekda Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif berharap agar masyarakat dapat terbantu. Paling tidak meringankan beban, terutama kebutuhan pokok.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dinsos Kabupaten Balangan Salurkan 109 Ton Beras Untuk Peserta PKH*, Jumat 25 September 2020
2. <https://klikkalsel.com>, *Dinsos Balangan Salurkan Bantuan Beras Kepada Penerima PKH*, Jumat 25 September 2020

Catatan Berita:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

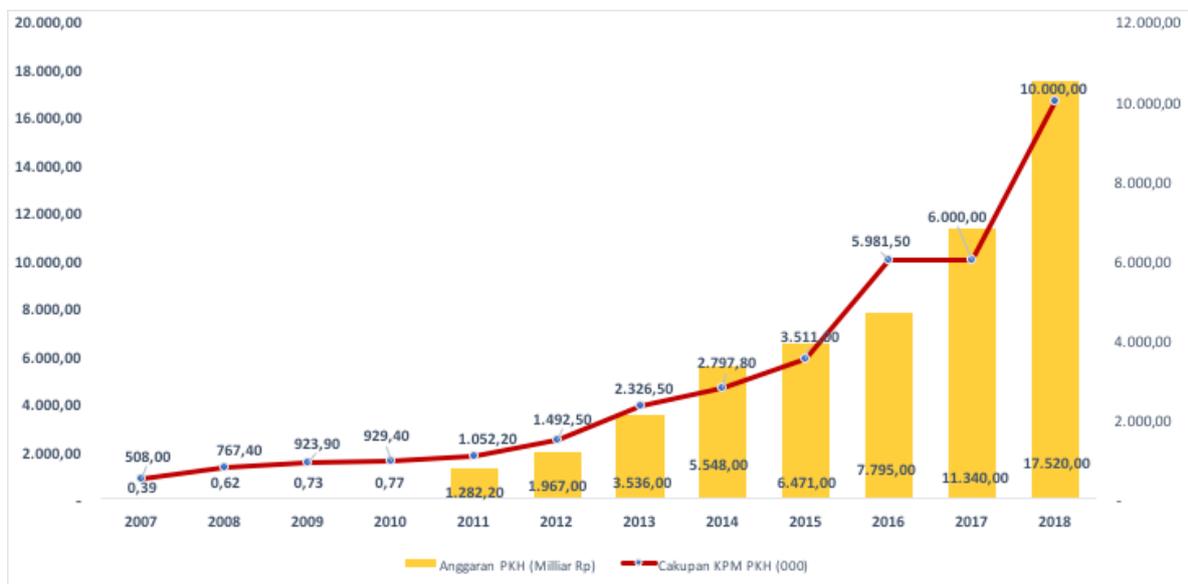
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of*

excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.



Gambar 1. Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018

- Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
- Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Di kuartal III tahun 2020, Kementerian Sosial kembali meluncurkan program bantuan sosial berupa beras dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menanggapi arahan Presiden, agar kementerian mendorong program yang memiliki daya ungkit perekonomian. Salah satunya adalah Bansos Beras yang bisa membantu mengurangi sebagian beban ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Mensos menyatakan bahwa Bansos Beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.

Program bansos beras ini merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan COVID-19, selain dari program reguler PKH, Sembako, dan BPNT yang sudah terlaksana sebelumnya.

Data yang akan digunakan sebagai dasar penerima bansos beras adalah data *by name by address* (BNBA) perluasan. Data ini merupakan KPM PKH yang menerima bantuan bulan Agustus 2020. Transporter adalah pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk membantu pengantaran beras dari Perum Bulog sampai ke KPM PKH.